

**TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP
PERAN APARAT DESA DALAM PENCEGAHAN COVID 19
(Studi Di Desa Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan
Kabupaten Tanggamus)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

**YULMA OKTAYANA
NPM: 1721020325**

Program Studi : Huum Tatanegara (Siyasah Syar'iiyah)



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

**TINJAUAN FIKIH SIYASAH
TERHADAP PERAN APARAT DESA DALAM PENCEGAHAN
COVID 19 (Studi Di Pekon Susuk Kecamatan
Kelumbayan Kabupaten Tanggamus)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**YULMA OKTAYANA
NPM :1721020325**

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing 1: Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H

Pembimbing II: Ahmad Burhanuddin, S.H.I, M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

1441 H /2021 M

ABSTRAK

Peran aparat pekon merupakan satu ukuran yang menyatakan seberapa jauh usaha dan kualitas yang telah dicapai oleh aparat pekon yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Peran aparat pekon adalah sebagai pemerintah harus mampu bekerja secara baik dan benar dalam mendampingi kepala desa terutama membantu menyelesaikan masalah fenomena Covid 19, dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa haruslah mengacu kepada aturan pemerintah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu perangkat desa terutama kepala desa diharapkan benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran aparat Pekon dalam pencegahan Covid 19 di Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus dan bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap peran aparat pekon dalam pencegahan Covid 19 di Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fiel dan research*), dengan teknik pengumpulan data observasi, interview, dokumentasi. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode penelitian kualitatif yang dipadukan dengan teori kepustakaan, lalu dari data yang terkumpul diolah secara sistematis dengan menggunakan pola berfikir induktif.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa peran aparat Pekon dalam pelaksanaan pencegahan Covid 19 di Pekon Susuk tidak maksimal sehingga tidak amanah dan tidak bertanggungjawab terhadap tugasnya, dilihat dari adanya beberapa peraturan dari pemerintah yang tidak terlaksana, serta kurangnya antusias terhadap pencegahan Covid 19 tersebut. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran aparat pekon dalam pencegahan Covid 19 ditinjau dari fikih siyasah tidak melaksanakan sifat siddiq, amanah, fatonah, dan tabligh.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp. 0721703260

PERSETUJUAN

**Judul : Tinjauan Fiqh Siyasaah Terhadap Peran Aparat Desa
Dalam Pencegahan Covid 19 (Studi Di Pekon Susuk
Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus)**

**Nama : Yulma Oktayana
Npm : 1721020325
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasaah Syar'iiyyah)
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
NIP. 197111061998032005**

**Ahmad Burhanuddin, S.H., M.H.
NIP. 2019040119921214002**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan**

**Frengki, M.Si.
198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp. 0721703260

PENGESAHAN

**Skripsi: "TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN
APARAT DESA DALAM PENCEGAHAN COVID 19 (Studi Di
Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus)"**
disusun oleh: **Yulma Oktayana, NPM: 1721020325, Program Studi:
Siyasah. Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah pada
hari/tanggal: Selasa 25 Mei 2021.**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Dr. M. Yasir Fauzi, M.H

Sekretaris : Kartika S. M.Pd

Penguji I : Dr. Jayusman, M.Ag

Penguji II : Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag. M.H

Penguji III : Ahmad Burhanuddin, S.H.I. M.H.I

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr.H. Khairuddin M.H
NIP. 196210221993031002**

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.(QS Al-Anfaal (8):27)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, sayang dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta , Ayahanda Mahyuddin dan Ibunda Yuliana yang tidak pernah lelah untuk senantiasa membesarkanku, membimbing dan memberikan dukungan baik moril, maupun materil, nasehat, mendoakan serta memberikan motivasi dan dukungan demi terwujudnya sebuah amanah dan cita-cita yang diinginkan. Terimakasih kepada ayahanda dan ibu atas jasa, pengorbanan, dan keiklasan membesarkan aku dengan tulus kasi sayang.
2. kepada adikku tercinta Laili Fitri, yang selalu mendoakan serta selalu mendukung serta memberikan semangat untuk kesuksesan dan keberhasilan kakak. Semoga kelak kita berdua mampu membahagiakan mereka karena berkat dirinyalah kita bisa seperti ini.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu pengetahuan yang selalu saya banggakan.

Demikian mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dan peneliti akhiri dengan memanjatkan do'a semoga segala amal baik kita diterima sebagai ibadah dan senantiasa menunjukkan jalan yang benar serta dapat menambah wawasan bagi yang membacanya.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Yulma Oktayana dilahirkan di Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus pada tanggal 19 Oktober 1998, merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Mahyuddin dan Ibu Yuliana.

Penulis menyelesaikan pendidikan di:

1. Penulis mengawali pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri I Kelumbayan Tanggamus, dan diselesaikan pada tahun 2011.
2. Pendidikan lanjut diselesaikan di SMP Negeri I Kelumbayan Tanggamus dan selesai pada tahun 2014.
3. Pendidikan menengah atas dilanjutkan di SMAN I Kelumbayan Tanggamus dan selesai Tahun 2017.
4. Pada tahun 2017 penulis Melanjutkan Pendidikan Strata 1 di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah program studi Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara).



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk dan limpahan rahmat-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis perlu menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung beserta segenap Staf pimpinan dan segenap karyawan yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan dikampus tercinta ini.
2. Dr. H Khairuddin, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung beserta segenap karyawan yang telah berkenan memberikan kesempatan dan bimbingan kepada peneliti selama studi.
3. Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H, selaku pembimbing I yang telah memberikan saran dan sumbangan pemikiran sehingga tersusun skripsi ini.
4. Ahmad Burhanuddin, S.H.I, M.H.I, selaku pembimbing II yang dengan sabar serta susah payah memeberikan bimbingan dan pengarahan secara ikhlas dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Frenki, M.Si, selaku ketua jurusan siyasah syar'iiyyah yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah sehingga selesai.
7. Bapak Soejono S.E selaku penanggung jawab Pekon Susuk Kelumbayan Tanggamus beserta perangkatnya yang telah meberikan bantuan dan memeberi izin tempat penelitian.

Akhirnya dengan iringan terimakasih penulis memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT, Semoga jerih payah dan amal baik bapak ibu serta teman-teman akan mendapatkan balasan dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Bandar Lampung 27 Mei 2021

Yulma Oktayana
1721020325

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk dan limpahan rahmat-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis perlu menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

8. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung beserta segenap Staf pimpinan dan segenap karyawan yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan dikampus tercinta ini.
9. Dr. H Khairuddin, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung beserta segenap karyawan yang telah berkenan memberikan kesempatan dan bimbingan kepada peneliti selama studi.
10. Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H, selaku pembimbing I yang telah memberikan saran dan sumbangan pemikiran sehingga tersusun skripsi ini.
11. Ahmad Burhanuddin, S.H.I, M.H.I, selaku pembimbing II yang dengan sabar serta susah payah memeberikan bimbingan dan pengarahan secara ikhlas dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Frenki, M.Si, selaku ketua jurusan siyasah syar'iiyyah yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Bapak Dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah sehingga selesai.
14. Bapak Soejono S.E selaku penanggung jawab Pekon Susuk Kelumbayan Tanggamus beserta perangkatnya yang telah meberikan bantuan dan memeberi izin tempat penelitian.

Akhirnya dengan iringan terimakasih penulis memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT, Semoga jerih payah dan amal baik bapak ibu serta teman-teman akan mendapatkan balasan dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Bandar Lampung 27 Mei 2021

Yulma Oktayana
1721020325

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| PERSETUJUAN..... | iv |
| PENGESAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xiii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Penegasan Judul..... | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah | 2 |
| C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian | 4 |
| D. Rumusan Masalah | 4 |
| E. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 4 |
| F. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan | 5 |
| G. Metode Penelitian..... | 7 |
| H. Sistematika Pembahasan | 10 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|---|----|
| A. Aparat Desa (Pekon) Dalam Undang – Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa | |
| 1. Pengertian Aparat Desa Menurut Undang – Undang Desa Tahun 2014..... | 11 |
| 2. Struktur Aparat Desa..... | 11 |
| 3. Macam – Macam Aparat Desa Tugas Serta Fungsinya..... | 11 |
| B. Aparat Desa (Pekon) Dalam Fikih Siyasah | |
| 1. Pengertian Fiqih Siyasah | 16 |
| 2. Siyasah Dusturiah | 18 |
| 3. Aparat Desa (Pekon) Di Tinjau Dari Fiqih Siyasah | 22 |
| 4. Karakteristik Aparat Desa (Pekon) Perspektif Fikih Siyasah | 25 |
| C. Corona Virus Diseases (COVID 19) | |
| 1. Sejarah dan Pengertian Corona Virus | 26 |
| 2. Gejala Infeksi Corona Virus | 27 |
| 3. Faktor Resiko infeksi Corona Virus | 27 |
| 4. Penyebab Virus Corona | 28 |
| 5. Pencegahan Terhadap Covid 19 | 29 |

| | |
|--|----|
| D. Corona Virus (Covid 19) Dalam Hukum Islam | 33 |
|--|----|

BAB III GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa (Pekon) Susuk

| | |
|--|----|
| 1. Sejarah Desa (Pekon) Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus | 37 |
| 2. Letak geografis dan Administratif | 37 |
| 3. Keadaan Demografi Pekon Susuk | 38 |
| 4. Struktur Aparat Desa Pekon Susuk..... | 42 |

B. Peran Aparat Pekon Susuk dalam pencegahan Covid 19

| | |
|--|----|
| 1. Peran Aparat Pekon Dalam Pencegahan COVID 19 | 43 |
| 2. Upaya Yang Dilakukan Perangkat Pekon Dalam Pencegahan Covid 19 Di..... | 48 |
| 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Aparat dalam Pelaksanaan Tugas Pencegahan Covid | 54 |

BAB IV HASIL ANALISIS PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Peran Aparat Desa dalam Pencegahan Covid 19 di Pekon Susuk Kelumbayan Tanggamus | 56 |
| B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Aparat Desa dalam Pencegahan Covid 19 di Pekon Susuk..... | 58 |

BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------------|----|
| A. Simpulan | 61 |
| B. Rekomendasi/Saran | 61 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| 1. Tabel Jumlah Penduduk Desa Pekon Susuk..... | 38 |
| 2. Tabel Berdasarkan Agama | 39 |
| 3. Tabel Berdasarkan Pekerjaan | 39 |
| 4. Tabel Berdasarkan Pendidikan..... | 40 |
| 5. Tabel Berdasarkan Prasarana | 41 |
| 6. Tabel Sarana Pencegahan Covid Di Pekon Susuk | 53 |



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Riset 2 Surat Riset

Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 4 Blangko Konsultasi Skripsi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna memperjelas pokok bahasan penulisan skripsi ini, maka perlu penjelasan dengan makna atau definisi yang terkandung di dalamnya. Judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Peran Aparat Desa Dalam Pencegahan Covid 19”** (Studi Di Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus).

Judul ini terdiri dari beberapa istilah pokok sebagai berikut:

1. Tinjauan berasal dari kata tinjau. Tinjauan adalah sebuah homonim karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Tinjauan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga tinjauan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.¹
2. “Fikih Siyasah” adalah salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan kepengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²
3. Peran adalah suatu tindakan yang dilakukan individu atau sekelompok orang dalam suatu kejadian atau peristiwa, dan merupakan suatu pembentuk tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai kedudukan di masyarakat.³
4. Aparat Desa adalah Alat kelengkapan pemerintah desa yg terdiri atas sekretaris desa dan kepala dusun.
5. Pencegahan merupakan semua tindakan yang bertujuan untuk menghalangi, menahan, ataupun menangkali terjadinya sesuatu hal.⁴
6. Covid adalah Infeksi virus Corona disebut Covid 19 (Corona Virus Disease 2019) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Corona virus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (*pneumonia*). jenis baru dari corona virus

¹Petter Salim, M.A., B. Sc. Kamus Bahasa Kontemporer, (Jakarta: Moderen English Perss, 11991), h.722

²Randi Mukhariman, *Siyasah Kebangsaan*, Purwokerto Jawa Tengah, (Penulis Muda,2016). h.20

³<https://pendidikan.co.id/pengertian-peran-konsep-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/>

⁴<https://brainly.co.id/tugas/390436>.diakses.10 Mei,2020, Pukul 11.00 Wib

yang menular ke manusia walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.⁵

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah tinjauan fiqh siyasah terhadap peran aparat desa dalam pencegahan Covid 19 Di Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus.

B. Latar Belakang Masalah

Aparat desa atau aparat kelurahan merupakan pegawai pejabat pelayanan publik yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat, dan membantu lurah atau kepala desa dalam menjalankan tugasnya. Tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama dimasa Covid 19 mengharuskan para aparat desa harus dapat memberikan pelayanan sesuai protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu perangkat desa dituntut memiliki kemampuan, keterampilan dan perasaan perhatian yang tulus dan membutuhkan rasa empati yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat.

Peran aparat pemerintah pekon merupakan satu ukuran yang menyatakan seberapa jauh usaha dan kualitas yang telah dicapai oleh aparat pekon yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Peran aparat pekon adalah sebagai dari pemerintah harus mampu bekerja secara baik dan benar dalam mendampingi kepala desa khususnya dalam melakukan pencegahan Covid 19, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pada bab I pasal 2 Tentang Desa disebutkan bahwa Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berkaitan dengan ketentuan tersebut, hal ini mengisyaratkan bahwa dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, terutama dalam melakukan pencegahan Covid 19 ini harus dapat dijalankan oleh aparatur desa karena masyarakat desa telah berkembang dengan berbagai kegiatan yang semakin membutuhkan aparatur pemerintah yang profesional. Seiring dengan perkembangan masyarakat ditengah terjadinya Virus

⁵<https://www.alodokter.com/virus-corona>.diakses. 10 Mei 2020, Pukul 11.00 Wib

Covid 19 tersebut, kebutuhan akan pelayanan yang semakin kompleks serta pelayanan yang semakin baik, cepat, dan tepat sangat diperlukan oleh masyarakat.

Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada kepala desa. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 49 Tentang Desa) dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan desa haruslah mengacu kepada aturan pemerintah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu perangkat desa terutama kepala desa diharapkan benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan.⁶

Adapun langkah pertama yang harus dilakukan oleh kepala desa beserta aparat desa adalah dengan membentuk Satgas penanganan Covid 19 tingkat desa sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, Gubernur, Bupati atau Walikota. Satgas Covid 19 desa tersebut diketuai oleh kepala desa, Satgas desa berperan menjalankan tugas untuk membantu percepatan penanganan Covid 19, mulai dari langkah pencegahan, penanganan sesuai protokol kesehatan sampai penyaluran program-program bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota.

Peran aparat desa dalam pencegahan Covid 19 di Pekon Susuk ini membuat posko Satgas Covid 19, mengadakan jadwal piket untuk penjagaan posko Satgas Covid, memberikan himbauan terhadap masyarakat. Namun dalam segi pelaksanaan, peran aparat Pekon Susuk tidak optimal, mengingat masih ditemukannya aparat pekon yang kurang adanya rasa tanggung jawab dalam mengemban tugas, selain itu juga tidak adanya rasa empati terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pelaksanaan pencegahan Covid 19 tentunya tidak terlepas dari peran aparat Pekon Susuk, sesuai dengan pengamatan peneliti peran aparat Pekon Susuk tidak adanya rasa tanggung jawab serta dalam mengemban tugas, serta tidak memiliki rasa partisipasi terhadap peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Faktor lain yang menyebabkan penghambat dalam pencegahan Covid 19 ini yaitu disiplin aparat desa dalam menjalankan tanggung jawab pada saat bekerja, faktor pendidikan yang menyebabkan aparat desa tidak begitu antusias terhadap peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, faktor sarana prasarana dimana salah satunya menjadi alasan aparat desa dalam bekerja atau menjalankan tugas, dengan terbatasnya alat maupun perlengkapan pencegahan Covid 19 seperti alat cek suhu tubuh, hand sanitaizer, masker, dan lain sebagainya.

⁶Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 26 Ayat (1)

Dari latar belakang di atas maka peneliti ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana peran aparat desa dalam pencegahan terhadap Covid 19 Di Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus dalam perspektif fiqh siyasah. Dari fenomena sekarang yang terjadi di masyarakat ini yang sering mendapat sorotan tajam dari masyarakat terutama bagaimana peran dan kinerja serta usaha para aparat desa dalam melindungi masyarakatnya terhadap virus Corona tersebut.

C. Fokus Penelitian dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan penetapan area spesifik yang akan hendak diteliti, sesuai dengan judul yang ada bahwa penelitian ini penelitian lapangan. Area spesifik yang dimaksudkan disini adalah di Kantor Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus, yang memfokuskan kepada Peran Aparat Pekon Susuk dalam pencegahan Covid 19 yang akan di tinjau dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 49 Tentang Desa dan juga Hukum Islam.

D. Rumusan masalah

yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana Peran Aparat Pekon dalam Pencegahan Covid 19 di Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus ?
2. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Aparat Pekon dalam Pencegahan Covid 19 di Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Peran Aparat Pekon dalam Pencegahan Covid 19 di Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap Peran Aparat Pekon dalam Pencegahan Covid 19 di Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan peran yang baik dan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi aparat desa (Pekon)

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi aparatur desa (Pekon) Susuk Kecamatan Kelumbayaan Kabupaten Tanggamus untuk meningkatkan rasa tanggungjawab dan

rasa empati yang tinggi terhadap peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah

b. Bagi Peneliti

Guna memenuhi salah satu syarat dari tugas akhir mahasiswa yaitu memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), pada Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dan juga sebagai penambahan wawasan baru didalam lingkungan masyarakat

c. Bagi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Peneliti ini dapat menambah daftar koleksi pustaka untuk bahan bacaan dan kajian mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, khususnya mahasiswa fakultas syariah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Dari banyaknya karya ilmiah sebelumnya sudah banyak yang membahas mengenai peran aparat desa, salah satunya didalam pembahasan skripsi ini penulis mengambil judul tentang tinjauan fiqih siyasah peran aparat desa dalam pencegahan Covid 19 (studi di Pekon Susuk Kelumbayan Kabupaten Tanggamus). Namun di dalam karya ilmiah ini mengambil tinjauan pustaka dari rekan kita yang bernama Rizal Yulawan, dengan skripsi yang berjudul Peran Perangkat Desa Untuk Mengembangkan Prinsip Transparansi Dalam Good Governance, (Studi Kasus Di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo), yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2016. Didalam pembahasan skripsi rekan kita tersebut memang sebenarnya pembahasannya tidak sama namun ada beberapa pembahasan yang ditemukan hampir sama dengan skripsi yang kami bahas. Seperti didalam skripsi beliau ini membahas tentang peran perangkat desa, lalu tentang bagaimana strategi mereka dalam melaksanakan perannya untuk mengembangkan prinsip transparansi dalam Good Governance tersebut, serta bagaimana kendala yang mereka hadapi dalam melaksanakan peran mereka tersebut. Namun yang membedakan dengan skripsi yang kami bahas adalah hasil dari peran aparat desa tersebut, baik dari strategi serta bagaimana peran aparat desa tersebut dan dan kendala yang mereka hadapi. Kesimpulan dari skripsi beliau adalah dimana peran aparat desa tersebut sudah dikatakan maksimal, karena baik dari aparat desanya, masyarakat serta unsur yang lainnya saling mendukung satu sama lain, saling melengkapi serta kerja sama yang baik, dan dalam strategi pun

aparatus mereka melakukan strategi yang baik sehingga benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan.⁷

Tinjauan pustaka selanjutnya adalah skripsi atas nama Sulaiman, yang berjudul *Tinjauan Fiqh Al-Siyasah Al-Dusturiyyah Terhadap Implementasi Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Dan Pembinaan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Angsanah Kec. Palengaan Kab. Pamekasan)*, yang berasal dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Tata Negara Surabaya Tahun 2019, di dalam pembahasan karya ilmiah ini dimana sebenarnya jelas tidaklah sama dengan skripsi yang penulis bahas, akan tetapi ada beberapa kesamaan didalam materi yang kami bahas, dimana terdapat penjelasan tentang siyasah dusturiah.⁸

Pada tinjauan pustaka selanjutnya adalah dari Saudari Lisa Oktavia yang berjudul *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi Di Desa Penggawa Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)*, tahun 2018. Dalam pembahasan Skripsi beliau dimana ada kesamaan materi dengan skripsi yang kami bahas. Salah satunya membahas tentang peran, tanggung jawab aparat desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Adapun letak kesamaan dalam pembahasan ini adalah dimana hasil dari penelitiannya yaitu jika dilihat dari perannya secara umum tidak optimal sehingga tidak amanah dan tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas berdasarkan wewenang dan kewajibannya. Hal tersebut masih dilihat beberapa pembangunan yang belum terlaksanakan. Kurang transparansi atas informasi kepada masyarakat serta minimnya peran aktif kepala pekon dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Jika dilihat dari tinjauan fikih siyasah dan Undang-Undang desa terhadap peran kepala pekon dalam pelaksanaan pembangunan yaitu dalam tinjauan fikih siyasah pemimpin yang kurang amanah dan kurang bertanggung jawab. Dalam tinjauan Undang-Undang Desa kepala pekon kurang menerapkan asas transparansi dan kurang mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif sehingga peran kepala pekon dalam menjalankan tugasnya kurang sesuai dengan peraturan undang-undang desa.⁹

Banyaknya pemaparan dan juga penjelasan diatas sudah dapat disimpulkan persamaan maupun perbedaan dari isi dan judul Skripsi ini,

⁷Rizal Yulian, *Peran Perangkat Desa Untuk Mengembangkan Prinsip Transparansi Dalam Good Governance*, (Studi Kasus Di Desa Py8 abelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo). 2016.

⁸Sulaiman, *Tinjauan Fiqh Al-Siyasah Al-Dusturiyyah Terhadap Implementasi Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Dan Pembinaan Masyarakat Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014* (Studi Kasus Di Desa Angsanah Kec. Palengaan Kab. Pamekasan).2019.

⁹Lisa Oktavia, *Skripsi Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan*(Studi Di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, 2018.

persamaan dari ketiga aparat desa (Pekon) adalah sama-sama membahas tentang bagaimana peran aparat desa (Pekon) dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang sudah diberikan oleh pemerintah sedangkan, dari perbedaan skripsi ini dengan ketiga skripsi diatas adalah dimana hasil dari analisis skripsi ini menyatakan bahwa aparat desa (Pekon) tidak menjalankan tugas serta kewajibannya yang dimana seharusnya dilaksanakan dan juga perbedaannya dari ketiga jurnal ataupun Skripsi diatas tidak di temukan pengkaitan baik dari Hukum Islam ataupun menurut Undang-Undang Nomor No. 6 Tahun 2014.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Alasannya, karena penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini mengkaji tentang peran aparat pekon dalam pencegahan Covid 19, yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan apa yang ada dan dikaji secara mendalam untuk mengetahui peran aparat Pekon dalam pencegahan covid 19 ditinjau dari fiqh siyasah.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi pada suatu saat dengan masyarakat.¹⁰ Jadi penulis mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang ada di tengah masyarakat dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Adapun objek penelitian lapangan tersebut adalah studi di Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Tanggamus. Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian Deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.¹¹ Sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, diinpresentasikan kemudian disimpulkan.¹²

2. Populasi dan Sampel

Populasi yaitu semua unit yang akan diteliti dari karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum, atau seluruh obyek yang menjadi pokus penelitian.¹³ Adapun populasi dalam

¹⁰Kartini Kartano, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Manadr Maju, 1996), h.3.

¹¹Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h.7

¹²Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, Cetakan Ke 3, 2011) , h.3

¹³Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), h.5

penelitian ini adalah seluruh aparat pekon dan masyarakat pekon susuk Kecamatan Kelumbayan Tanggamus.

Sampel adalah bagian dari populasi yang hendak digeneralisasikan. Penelitian ini dalam menentukan sampel digunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu, yaitu untuk memilih responden yang benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah: Seluruh aparat pekon dan masyarakat yang turut berperan aktif dalam pencegahan covid 19 di Pekon Susuk Kelumbayan Tanggamus. Adapun jumlah sampelnya adalah sebanyak 10 orang, terdiri dari 1 Penanggungjawab Pekon, 5 Perangkat Pekon dan 1 tokoh adat, 3 masyarakat Pekon Susuk.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data primer yaitu data-data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian. Sumber data primer ini diperoleh dari hasil Interview (wawancara) dan library riserch yang diperoleh dari buku-buku fiqh siyasah, Al-Qur'an, Hadis, dan Wawancara dengan para aparat desa yang memberikan keterangan tentang pencegahan covid 19 di pekon Susuk, dan data-data yang tepat dari lokasi penelitian yaitu di Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Tanggamus.

Data sekunder adalah sumber data yang mendukung sumber primer yang penulis peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena yang diselidiki yang terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung.¹⁴ Observasi ini dilaksanakan untuk melihat dari dekat tentang kebenaran yang disampaikan oleh responden. Adapun yang menjadi bahan observasi adalah Peran Aparat Desa dalam Pencegahan Covid 19 di Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus.

b) Metode Interview (Wawancara)

Metode interview adalah suatu percakapan tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih yang duduk

¹⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h.8.

berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.¹⁵ Wawancara yang dilakukan penulis untuk memperoleh pemahaman mengenai pandangan atau perspektif seseorang terhadap isu atau tema tertentu, yakni dengan cara tanya jawab secara lisan dan tatap muka langsung kepada orang yang bersangkutan. Wawancara ini dimaksud untuk memperoleh data dalam penelitian. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak berstruktur dengan beberapa orang yang memang berkapasitas dan patut untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan yang peneliti ambil, cara ini digunakan agar lebih mudah untuk mencapai tujuan.

c) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.¹⁶ Dokumentasi yang digunakan peneliti terkait dengan pokok masalah yang peneliti ambil. Dokumen bisa berupa data-data dari Pekon Susuk Kelumbayan Tanggamus ataupun data dari lembaga-lembaga yang terkait dengan pokok masalah yang peneliti ambil.

5. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang telah terkumpul diolah, dengan cara pemeriksaan Data (Editing) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis dan memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut diteliti. Rekontruksi Data (*Reconstructing*) yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.¹⁷

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh kemudian dilakukan analisis data. Adapun metode yang digunakan dalam analisa adalah metode deskriptif kualitatif yaitu apabila data yang terkumpul hanya sedikit, bersifat monografis atau wujud kasus-kasus (sehingga tidak

¹⁵Kartini Kartono, *Op.Cit.*, h.187.

¹⁶Suhar Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*(Jakarta: Rinec Cipta, 2006),h.10

¹⁷Amiruddi dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h.107.

dapat disusun kedalam struktural klasifikasi), maka analisisnya bersifat Deskriptif Kualitatif. selanjutnya analisa yang dilakukan akan ditarik kesimpulan terakhir guna memberi jawaban terhadap masalah yang berkaitan dengan Peran Aparat pekon dalam pencegahan Covid 19 di Pekon Susuk Kelumbayan Tanggamus perspektif fiqh siyasah.¹⁸

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kemudahan pada pokok-pokok pembahasan, maka penulis menyusun skripsi ini kedalam V bab. Yang dimuat dengan sistematika diharapkan untuk mudah dipahami oleh pembaca. Adapun sistematika penulis dalam skripsi ini saling berkaitan antara satu sama dengan yang lainnya. Secara umum gambaran sistematikanya antara lain:

Pada BAB 1. Terdapat pendahuluan meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada BAB 11. Akan membahas tentang teori Peran Aparat desa dalam pencegahan Covid 19 yang ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pada BAB 111. Terdapat deskripsi objek penelitian, yang berisikan tentang gambaran pada peran aparat desa(Pekon) dalam pencegahan Covid 19.

Pada BAB 1V. Terdapat analisis data peneltian dan temuan pada penelitian yang ada dilapangan.

Pada BAB V. Berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan isi Skripsi dengan cara disimpulkan/dirangkum secara ringkas, dan peneliti juga memberikan saran-saran untuk peneliti.

¹⁸Louis Goot Schalk, *Understanding Story, A. Primer Of Histirical*, Terjemahan Nugraho Notosusanto, UI Press, 1995, h.32.

BAB II LANDASAN TEORI

A. APARAT DESA DALAM UNDANG - UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

1. Pengertian Aparat Desa Menurut UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Aparat Desa adalah: bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa(SEKDES) dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur pemerintah desa dibawah naungan kepala desa (KADES). Adapun aparat desa lainnya yang dimaksud biasanya jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasa dikenal dengan sebutan kepala urusan(KAUR)/kepala seksi (KASI) dan unsur kewilayahan / kepala dusun (KADUS) yang ada di setiap pemerintahan desa. Sesuai dengan Undang-Undang diatas maka aparat desa bertanggungjawab sepenuhnya kepada kepala desa. Hal ini juga diatur dalam struktur organisasi tata kerja pemerintahan (SOTK).

2. Struktur Aparat Desa

Sedangkan secara yuridis formal, kedudukan aparat desa ada didalam UU DESA No.6 Tahun 2014 Pasal 48 dan PP No.83 Tahun 2015. Jadi, yang dimaksud sebagai perangkat desa adalah sekretaris desa, pelaksanaan kewilayahan, pelaksanaan teknis¹⁹

3. Macam – macam Aparat Desa Tugas Serta Fungsinya

- a. Kepala desa atau yang biasa disebut dengan kades memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
 - 1) Menjalankan roda pemerintahan desa dengan dasar kebijakan yang telah ditetapkan bersama dengan BPD (Badan Perwakilan Desa)
 - 2) Mengajukan suatu rancangan tentang peraturan yang akan diterapkan di suatu desa

¹⁹Undang-undang *Peraturan Daerah Dilengkapi Dengan Peraturan Pemerintah* (Tangerang, Tansmart: Cetakan Pertama 2017)

- 3) Menetapkan peraturan desa yang sudah disetujui bersama dengan BPD
- 4) Menyusun serta membuat peraturan tentang anggaran pendapatan desa yang selanjutnya akan dibahas dan ditetapkan bersama-sama dengan BPD
- 5) Melakukan pembinaan terhadap masyarakat desa dan juga ekonomi desa
- 6) Pembangunan yang hendak dilakukan di desa, lebih dahulu dikoordinasikan dan dilaksanakan dengan partisipasi semua warga
- 7) Mewakili desa baik di luar pengadilan atau di dalam pengadilan serta memiliki hak menunjuk kuasa hukum sebagai wakil dirinya, tentunya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
- 8) Melakukan kewajiban dan wewenang kepala desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Sekretaris Desa (Sekdes)

Tugas pokok dari sekretaris desa antara lain membantu persiapan kepala desa dan melakukan kegiatan administrasi desa, menyiapkan bahan untuk menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Fungsi dari sekretaris desa antaralain:

- 1) Melaksanakan beraneka macam tugas administrasi dan menyiapkan keperluan kepala desa supaya tugasnya berjalan dengan lancar.
- 2) Apabila kepala desa berhalangan untuk melakukan tugasnya, maka sekretaris dapat menggantikan.
- 3) Sama halnya apabila kades diberhentikan untuk sementara, maka yang memegang jabatan sementara atau melaksanakan tugas kepala desa untuk sementara adalah sekretaris desa.
- 4) Mempersiapkan bantuan dalam melaksanakan penyusunan peraturan desa.
- 5) Mempersiapkan bahan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.
- 6) Koordinasi tugas-tugas yang dilakukan

7) Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh kepala desa.²⁰

c. Kepala urusan Keuangan (Kaur Keuangan)

Kepala urusan keuangan atau yang dikenal dengan kaur keuangan ini tugas pokoknya antara lain membantu tugas sekretaris desa dalam mengelola sumber penghasilan desa, administrasi keuangan desa, persiapan bahan untuk membuat APBD desa.

Fungsi kepala urusan keuangan:

- 1) Mengelola administrasi keuangan desa
- 2) Mempersiapkan bahan untuk menyusun APBD desa
- 3) Melakukan tugas lain yang diberikan atau diperintahkan oleh sekretaris desa.

d. Kepala Seksi Pemerintahan (Kasi Pemerintahan)

Tugas pokok dari kasi pemerintahan antara lain membantu kepala desa untuk melakukan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertahanan, pembinaan, ketertiban masyarakat suatu desa, persiapan bahan dalam pelaksanaan kebijakan seperti kebijakan penataan dan kebijakan hukum desa.

Fungsi dari kepala urusan pemerintah antara lain:

- 1) Melaksanakan administrasi kependudukan
- 2) Mempersiapkan bahan untuk menyusun rancangan peraturan serta keputusan kepala desa
- 3) Melaksanakan administrasi pertahanan
- 4) Mencatat monografi desa
- 5) Mempersiapkan bantuan yang bertujuan untuk memperlancar penyelenggaraan dalam pemerintahan di desa dan melakukan penataan kelembagaan masyarakat
- 6) Melakukan tugas lain yang diberikan atau diperintahkan oleh kepala desa yang dimaksud dengan administrasi pemerintahan²¹

e. Kepala Urusan Umum (Kaur Umum)

Kepala urusan umum atau yang disebut kaur umum ini tugas pokoknya yaitu membentuk sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, kearsipan,

²⁰<https://gurupkn.com/tugas-dan-fungsi-aparat-desa>, Diakses 25 september 2020, Pukul 11.00 Wib

²¹Ulina, *Tugas Dan Fungsi Kepala Desa Beserta Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Kantor Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang*, *Perspektif* : 2085 – 0328 perspektif/ Volume 7/ Nomor2/ Oktober 2014, Diakses 12 Oktober 2020

tata usaha, inventarisasi desa, dan menyiapkan segala bahan untuk rapat dan pembuatan laporan.

Fungsi kepala urusan umum:

- 1) Pengendalian kearsipan dan surat masuk serta surat keluar
- 2) Mencatat inventarisasi atau kekayaan desa
- 3) Melakukan tugas administrasi umum
- 4) Menyimpan, menyediakan dan meyalurkan alat-alat tulis kantor serta bertanggung jawab dalam memelihara dan perbaikan terhadap perabot atau perlengkapan kantor
- 5) Melaksanakan pengelolaan administrasi perangkat desa
- 6) Menyiapkan bahan untuk membuat laporanMelakukan tugas lain yang diperintahkan oleh sekretaris desa²²

f. Kepala Dusun (KADUS)

Kepala dusun atau kepala pekon memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Membantu melaksanakan tugas dari kepala desa yang masih berada dalam wilayah kerjanya
- 2) Melakukan sosialisasi program-program pemerintahan kepada masyarakat
- 3) Membantu tugas kepala desa dalam membina serta koordinasi RT maupun RW yang masih berada diwilayah kerjanya
- 4) Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh kepala desa

Fungsi kepala dusun antara lain adalah:

- a) Melaksanakan koordinasi pembangunan desa, jalannya pemerintah desa, serta membina masyarakat yang ada didusun
- b) Melaksanakan pembinaan-pembinaan terhadap masyarakat dan tugas yang berhubungan dengan pembangunan atau melaksanakan koordinasi perihal masalah pembangunan yang terjadi di desa maupun didusun
- c) Berusaha untuk terus untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan

²²*Ibid* .50

gotong-royong sesama warga dengan kata lain meningkatkan partisipasi masyarakat

- d) Melakukan usaha dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- e) Melaksanakan beragam fungsi yang lain yang telah dilimpahkan oleh desa²³

g. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan

Kepala urusan pembangunan atau kepala urusan pembangunan memiliki tugas pokok antara lain adalah membantu kepala desa dalam mempersiapkan bahan untuk perumusan kebijakan teknis dalam hal pengembangan potensi desa, Mengelola administrasi pembangunan, mengelola pelayanan masyarakat.

Fungsi kaur pembangunan antara lain adalah:

- 1) Sebagai pelaksana dalam kegiatan administrasi pembangunan
- 2) Mempersiapkan bantuan untuk kajian perkembangan ekonomi warga masyarakat
- 3) Melakukan tugas lain yang diberikan atau diperintahkan oleh kepala desa

h. Kesejahteraan Rakyat (Kasi Kesra)

Disingkat dengan kaur kesra, memiliki tugas membantu kepala desa dalam mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam hal memberdayakan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

Fungsi kaur kesra:

- 1) Mempersiapkan bahan yang akan dipakai dalam program keagamaan
- 2) Mempersiapkan bahan yang akan dipakai dalam program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan
- 3) Mempersiapkan bahan yang akan dipakai dalam perkembangan kehidupan beragama
- 4) Melakukan tugas lain yang diberikan atau diperintahkan oleh kepala desa²⁴

²³<http://ringdikit-buleleng.desa.id/index.php/first/artikel/55>, Diakses 13 Oktober 2020, Pukul 14.00 Wib

²⁴<https://kependudukanpemdadiy.files.wordpress.com/2011/11/tugas-pokok-dan-fungsi-pemerintah-desal.pdfht>, Diakses 14 Oktober 2020, Pukul 15.00 Wib

i. Bahan Perhimpunan Pekon (BHP)

BHP mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

- 1) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- 3) Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
- 4) Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- 5) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- 6) Menyusun tata tertib BPD.²⁵

B. Aparat Desa (Pekon) Dalam Fiqih Siyasah

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Kata fiqih berasal dari *fuqaha- yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqih adalah “pemahaman yang mendalam”. Kata “*faqaha*” diungkapkan dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya”. Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qathi*), fiqih merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*)²⁶. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa fiqih adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. Fiqih disebut juga dengan hukum Islam. Karena fiqih bersifat ijtihadiah, pemahaman terhadap hukum syara’ tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Fiqih mencakup berbagai aspek kehidupan. Disamping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), fiqih juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi

²⁶ Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran Dalam Islam*, h.Ma’luf, al-munjid, h.591

menjadi jinayah (pidana), munakahat (perkawinan), mawaris (kewarisan), murafa'at (hukum acara), siyasah (politik ketatanegaraan) dan *al-ahkam al-dualiyah* (hubungan internasional). Pada bagian mendatang aspek-aspek fiqih Islam ini akan diuraikan secara lebih perinci, dari gambaran diatas jelaslah bahwa fiqih siyasah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syari'at yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dari objek kajian fiqih siyasah, perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologis maupun terminologis konsep fiqih siyasah tersebut.

Kata “siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan ²⁷ Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Secara terminologis, Abdul wahab khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.” ²⁸ Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan.” Adapun Ibnu Manzur mendefinisikan siyasah “mengatur atau memimpin sesuatu yang menghantarkan manusia kepada kemaslahatan.” ²⁹

Tiga definisi yang dikemukakan para ahli diatas masih bersifat umum dan tidak melihat / pertimbangan nilai-nilai syari'at, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh ibn Qayyim al-Jawziyah. menurutnya, siyasah adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rosulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT. Definisi senada dirumuskan oleh Ahmad fathi bahansi yang menyatakan bahwa siyasah adalah “pengaturan

²⁷ Ibn Manzhur, *Lisan Al-Arab*, Juz 6(Beirut:Dar Al-Shadar, 1968), h.108

²⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syari'ah*, (Kairo: Dar Al Anshar,1977)h. 4-5

²⁹ Ibn Manzhur, *Lisan Al-Arab*, Juz 6, h. 362

kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara'.”³⁰

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan kepengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangatlah bersifat *debatable* (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.³¹

2. Siyasah Dusturiah

Fiqh al-Siyasah al-Dusturiyyah mengandung arti suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan sistem pemerintahan menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku baik dalam al-Qur'an maupun Hadist dengan tujuan kemaslahatan bersama, serta menciptakan hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyat di pihak lain dan juga kelembagaan dalam masyarakat.³²

Siyasah dusturiyyah adalah bagian fiqh al-siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarahlahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan perundang-undangan), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta ummah yang menjadi

³⁰Ahmad Fathi Bahansi, *al-Siyasah al-Jinayah fi al-Syari'at al-Islam*, (mesir:maktabah dar al-umda, 1965),h.61

³¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014) , h.2-5. Diakses Tanggal 4 Juli 2020 Pukul 07.45 Wib. Lihat juga <https://books.google.co.id>

³²Mustofa Hasan. *Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-kaidah Fikih*. (Ejournal . Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Ac.id), 99.

pelaksanaan perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini membahas konsep negara hukum dalam siyasah syar'iyah, tujuan dan tugas-tugas negara dalam fiqh siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib di lindungi.³³

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.³⁴

Kata “dustur” berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Abu A'la al-Maududi menakrifkan dustur dengan suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu Negara.³⁵ Dengan demikian, al-Siyasah al-Dusturiyyah adalah bagian fiqh al-Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam al-Quran dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun

³³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 153.

³⁴Ibid., hlm.177

³⁵Imam Amrusi Jailani, *et al. Hukum Tata Negara Islam.*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2014), 22.

berbagai macam hubungan yang lain.³⁶ Atas hal-hal di ataslah siyasah dusturiyyah dikatakan sebagai bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara, yang secara spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintah, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.³⁷

Kaitannya dengan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat terlepas dari dua unsur pokok yaitu; Pertama, dalil-dalil kulli (dalil yang mempunyai sifat keseluruhan dan tidak menunjukkan kepada sesuatu persoalan tertentu dari perbuatan mukalaf), baik ayat-ayat al-Quran maupun hadis, maqashid syari'ah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat, karena dalil-dalil kulli tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.³⁸

Klasifikasi dan ruang lingkup Fiqh al-Siyasah al-Dusturiyyah dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah, terdapat ihtilaf dari para ulama. Namun perbedaan ini tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap sudut pandang masing-masing ulama, perbedaan tersebut dapat dilihat dari sisi jumlah pembagian masing-masing. Diantaranya adalah klasifikasi fiqh al-siyasah secara menyeluruh, yang disampaikan oleh Imam al-Mawardi dalam kitab Ahkam al-Sulthaniyyah, dirinya memberikan penjelasan bahwa fiqh al-Siyasah terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya:³⁹ Siyasah al-Dusturiyyah (Perundangan), Siyasah al-Maliyyah (Keuangan), Siyasah al-Qada'iyyah (Peradilan), Siyasah al-Harbiyyah (Peperangan) dan Siyasah al-Idariyyah (Adminitrasi). Dari beberapa ruang lingkup fiqh al-Siyasah di atas, maka

³⁶Ibid.10

³⁷Ibid., 23.

³⁸Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 47-48.

³⁹Ali Bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah* (Beirut : Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 2006), 4.

menurut Iqbal dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian kelompok, antara lain:⁴⁰

Siyasah Dusturiyyah Politik Perundang-Undangan, bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum al-Tasyri'iyah oleh lembaga legislatif, peradilan atau al-Qada'iyyah oleh lembaga yudikatif dan administrasi pemerintahan atau al-Idariyyah oleh eksekutif.

Siyasah Dauliyyah Politik luar negeri

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. di bagian ini juga ada politik masalah peperangan atau siyasah al-Harbiyyah yang mengatur etika peperangan, dasar-dasar diizinkan perang, pengumuman perang, tawanan perang dan senjata.

Siyasah Maliyyah, Politik keuangan dan moneter yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan hak-hak politik, pajak dan perbankan. Dengan demikian, fiqh al-Siyasah al-Dusturiyyah adalah bagian fiqh al-Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam al-Quran dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain. Atas hal-hal di ataslah siyasah dusturiyyah dikatakan sebagai bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintah, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.⁴¹ Selain itu juga berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasankekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa

⁴⁰Lihat Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi...*, 13. Lihat Imam Amrusi Jailani et al, *Hukum Tata Negara...*, 15-16

⁴¹Ibid., 23.

dan rakyat.⁴² Selain itu pembahasan mengenai fiqh al-siyasah al-dusturiyyah menurut beberapa tokoh terbagi menjadi beberapa bidang, seperti yang disampaikan oleh Djazuli, dirinya berpendapat bahwa Fiqh al-siyasah al-dusturiyyah terbagi sebagai berikut:

1) Bidang Siyasah Tasri'iyah

Pembahasan terkait dengan siyasah ini adalah pada persoalan ahl al-hall wa al-'aqd (majelis shura), perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Daerah

2) Bidang Siyasah Tanfidhiyyah

Pembahasan terkait dengan siyasah ini adalah meliputi pembahasan tentang imamah persoalan bai'ah, wuzarah dan waliy al-ahdi.

3) Bidang Siyasah Qadaiyyah

Pembahasan terkait dengan siyasah ini adalah meliputi pembahasan tentang peradilan.

4) Bidang Siyasah Idariyyah

Pembahasan terkait dengan siyasah ini adalah meliputi pembahasan tentang administrasi dan kepegawaian.⁴³

3. Aparat Pekon Di Tinjau Dari Fikih Siyasah

Adapun dalam fiqh siyasah Kata “wizarah” diambil dari kata Al-wazir yang berarti berat. Hal ini dikarenakan seorang Wazir memiliki tugas yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya.

Wazir adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara atau kerajaan yang bersangkutan. Mengenai kata wizarah terjadi saling berbeda pendapat dikalangan para ulama yang secara garis besar terbagi menjadi tiga yaitu: Pertama, wizarah berasal dari kata *Al-Wizar* yang berarti beban karena wazir memikul tugas yang dibebankan oleh kepala negara kepadanya. Kedua, wizarah diambil dari kata *Al-Wazar* yang

⁴²J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah “Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: Raia Grafindo Persada, 1997), 40.

⁴³H.A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syar'iyah*, Cet Ke 3, (Jakarta : Pranada Media Group, 2003), 48.

berarti *Al-malja* (tempat kembali) karena kepala negara membutuhkan pemikiran dan pendapat wazirnya sebagai tempat kembali untuk menentukan dan memutuskan suatu kebijakan negara, dan yang ketiga wizarah juga berasal dari *Al-Azr* yang berarti punggung karena fungsi dan tugas wazir adalah sebagai tulang punggung bagi pelaksanaan kekuasaan kepala negara, sebagaimana halnya badan menjadi kuat tegak berdiri karena ditopang punggung.⁴⁴ Dapat ditarik pemahaman bahwa wazir merupakan pembantu kepala negara, raja atau khalifah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab, pada dasarnya kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa bantuan orang-orang terpercaya dan ahli dibidangnya. Karenanya kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran wazir sehingga sebagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya kepada wazir dengan kata lain wazir merupakan tangan kanan kepala negara dalam mengurus pemerintahan.⁴⁵

Sejarah Rasulullah SAW disebutkan bahwa Abu Bakar dan Umar dijadikan oleh Rasul sebagai wazir beliau. Ketika Rasulullah wafat, kaum muslimin memilih Abu Bakar menjadi Khalifah dan ia menjadikan Umar wazirnya. Kemudian diteruskan oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Wazir memiliki hak pengawasan umum terhadap semua persoalan, di samping bertindak dengan kekuatan konsultatif, dia juga mempunyai hak pengawasan terhadap departemen kemiliteran.

Penerapan sistem wazir atau perdana menteri ini untuk pertama kalinya dilakukan oleh Khalifah Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Seorang wazir berfungsi sebagai pendamping khalifah memiliki kewenangan untuk menggantikan beban dan tanggung jawab khalifah dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, apabila khalifah tengah berhalangan atau tidak dapat menjalankan pemerintahan karena sesuatu. Diantara syarat yang dimiliki seorang wazir adalah cerdas, cakap, terampil, dapat dipercaya dan mau berkerja keras untuk kemajuan.⁴⁶

Pengertian wazir sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas disebutkan dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam melaksanakan dakwahnya kepada Fir'aun, dalam sejarah islam pengertian wazir sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dimainkan oleh Abu Bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad Saw. Abu Bakar

⁴⁵Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 10-14

⁴⁶Al-Mawardi, *Al- Ahkam Al-Sultaniyyah Wu Ul- Wilayah Ad-Diniyyah*, AL-Makhtab Al-Islam, Bairut, 1416 II, h. 49

memainkan peran penting sebagai partner setia Nabi Muhammad Saw, diantara yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiannya menemani Nabi Muhammad Saw hijrah dari Mekah ke Madinah, Abu Bakar juga disamping tentunya sahabat-sahabat lainnya sering dijadikan sebagai teman dalam musyawarah memutuskan berbagai persoalan umat.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Ibn umar r.a berkata saya telah mendengar rasulullah saw bersabda setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungan jawab) darihal hal yang dipimpinnya.(Bukhari, Muslim).⁴⁷

Pada saat-saat terakhir kehidupan Nabi, Abu Bakar pun menjadi pengganti Nabi untuk mengimami umat Islam sholat berjamaah. Disamping itu, kementerian juga mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengawasan administrasi, karena tugasnya mencakup pembagian gaji militer. Untuk itu, kementerian perlu mengawasi pendanaan dan pembagiannya.

Begitu juga dengan pengawasan terhadap tulis-menulis dan surat-menyurat agar rahasia kerajaan atau negara tetap terjaga, selain menjaga kualitas dan gaya bahasa agar selalu menarik. Sebab bahasa masyarakat bangsa arab mulai luntur dan rusak. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan kerajaan, maka stempel kerajaan pun dibuat untuk memperkuat keabsahan dokumen-dokumen kerajaan dan agar tidak tersebar secara bebas. Tugas ini juga dilimpahkan kepada

⁴⁷ H.R. Shahih Al-Bukhari Muslim No. 264 Kitab Hukum-hukum, <https://www.hadits.id>. Diakses pada tanggal 22 November 2020, Pukul 11.00 Wib.

kementerian, dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa kata Al-Wazir mempunyai pengertian menyeluruh yang mencakup tugas-tugas yang berhubungan dengan pedang maupun pena, serta berbagai pengertian kementerian dan pembantu penguasa.⁴⁸

4. Prinsip Pemerintah Desa Perspektif Fiqih Siyasah

Dalam menjalankan kewajiban dan tanggungjawab aparat pekon dituntut harus memiliki prinsip sebagai berikut:

a) Sidiq (Jujur)

Kejujuran merupakan syarat utama bagi seorang pemimpin. Masyarakat akan menaruh respek kepada pemimpin apabila dia diketahui dan juga terbukti memiliki kualitas kejujuran yang tinggi. Pemimpin yang memiliki prinsip kejujuran akan menjadi tumpuan harapan para pengikutnya. Memiliki sifat kejujuran, dan selalu melandasi ucapan, keyakinan dan perbuatan berdasarkan ajaran Islam. Dalam dunia kerja dan usaha, kejujuran ditampilkan dengan kesungguhan dan ketepatan, janji, dan pelayanan. Jujur juga dapat diartikan sebagai suatu sikap yang lurus hati, menyatakan sesuatu yang sebenar-benarnya tanpa ada kebohongan, artinya berkata dengan fakta dan realita yang sesungguhnya. Banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang harus berperilaku Shiddiq (jujur) yang mengarahkan untuk hidup damai, berapa jauh dirinya memperoleh kepercayaan dari pengikutnya.⁴⁹

b) Amanah

Amanah merupakan kualitas wajib yang harus dimiliki seorang pemimpin, dengan memiliki sifat amanah, pemimpin akan senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat yang telah diserahkan diatas pundaknya. Kepercayaan masyarakat berupa penyerahan segala macam urusan kepada pemimpin agar dikelola dengan baik dan untuk kemaslahatan bersama.

Amanah berarti memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban, artinya benar-benaar bisa dipercaya. Amanah ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ihsan (berbuat yang baik) dalam segala hal. Seorang muslim yang telah memiliki sifat profesional haruslah memiliki sifat yang amanah, yakni percaya dan bertanggung jawab. Rasulullah Saw memerintahkan setiap muslim untuk selalu menjaga amanah yang diberikan kepadanya.⁵⁰

⁴⁸*Ibid*, h. 24.

⁴⁹Tasmara Toto, *Spiritual Centered Leadership* (Jakarta: Erlangga, 2005), 163.

⁵⁰ Didin Hafihuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), Cet. Ke-1, h. 71

c) Tablig (Komunikatif)

Kemampuan berkomunikasi merupakan kualitas ketiga yang harus dimiliki oleh pemimpin sejati. Pemimpin bukan berhadapan dengan benda mati yang bisa digerakkan dan dipindah-pindah sesuai kemauannya sendiri, tetapi pemimpin berhadapan dengan rakyat manusia yang memiliki beragam kecenderungan. Oleh karena itu komunikasi merupakan kunci terjadinya hubungan yang baik antara pemimpin dan rakyat. mampu berkomunikasi dengan baik, mengajak sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain yang melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran Islam. Tabligh yang disampaikan dengan hikmat, sabar, argumentative dan persuasive akan membutuhkan hubungan kemanusiaan yang semakin solid dan kuat.

d) Fathanah (Cerdas)

Seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan diatas rata-rata masyarakatnya sehingga memiliki kepercayaan diri. Kecerdasan pemimpin akan membantu dia dalam memecahkan segala macam persoalan yang terjadi dimasyarakat. Berarti cerdas atau pandai, mengerti, memahami, dan menaati secara mendalam segala hal yang menjadi tugas dan kewajiban. Fathonah ini adalah sikap yang didasarkan pada Nabi Muhammad Saw dalam perantaraan beliau berbisnis. Sifat Fathonah sendiri banyak sekali artinya ada berpendapat bahwa Fathonah itu bijaksana dan cerdas, Namun pada hakikatnya adalah sama. Nabi Muhammad Saw sendiri dalam mempraktekkan sifat ini melalui berbisnis yang secara tidak langsung mengajarkan dengan ummatnya.⁵¹

C. Corona Virus Diseases (COVID 19)

1. Sejarah dan Pengertian Corona Virus

Virus 2019 Novel Corona Virus (2019-nCoV) yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Infeksi virus ini disebut Covid-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China, pada akhir Desember 2019. Ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di China ke beberapa Negara.

CoronaVirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini

⁵¹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1970), Juz 24, 128-129.

hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. namun, virus ini juga bisa menyebabkan pernapasan berat, seperti *pneumonia*, *Middle-East Respiratory* Infeksi virus Corona atau Covid 19 bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu, seperti hidung berair dan meler, sakit kepala, batuk berdahak, nyeri tenggorokan dan demam, atau gejala penyakit infeksi pernapasan berat, seperti demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada.⁵²

2. Gejala infeksi Coronavirus

Gejala Covid 19 sangat bervariasi dari mulai tidak ada gejala sama sekali, hingga gejala berat seperti infeksi sistemik (*sepsis*) dan gagal napas yang dapat menyebabkan kematian. Variasi gejala ini disebabkan oleh daya tahan tubuh masing-masing orang. Gejala yang paling sering ditemukan adalah gangguan saluran pernafasan, gangguan pencernaan, kelainan mata, dan kelainan kulit. Bahkan penelitian terbaru melaporkan virus ini dapat menyerang dan menyebabkan kegagalan seluruh organ tubuh termasuk jantung, ginjal, dan otak. Namun, secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus Corona, yaitu demam, batuk, sesak napas⁵³

3. Faktor resiko infeksi Coronavirus

Adapun yang berisiko terkena penyakit Covid 19 adalah semua orang tanpa terkecuali dari bayi hingga lansia, dari rakyat biasa hingga petinggi negara, artinya virus ini tidak memandang ras, bangsa, agama, jenis kelamin, status/kelas sosial. Mereka yang daya tahan tubuhnya rendah seperti berikut ini:

- a. Orang tua diatas 60 tahun Orang dengan penyakit penyerta
 - 1) Diabetes/ kencing manis
 - 2) Penyakit paru dan pernapasan
 - 3) Penyakit Jantung
 - 4) Penyakit liver
 - 5) Penyakit ginjal

⁵²Cakti Indra Gunawan, *Anomaly Covid 19: Dampak Positif Virus Corona Untuk Dunia*, (Purwokerto, CvVIDR, 2020), h. 1

⁵³*Ibid*, h..2

- 6) Kanker
- 7) HIV/AIDS
- 8) Gangguan sistem imunitas
- 9) Kelainan darah
- 10) Obesitas dll.
- b. Orang dalam pengobatan yang menurunkan daya tahan tubuh
- c. Ibu hamil.

Disamping itu, seseorang yang tinggal atau berkunjung ke daerah atau negara yang rawan virus corona, juga berisiko terserang penyakit ini. Misalnya berkunjung ke Tiongkok, khususnya kota Wuhan yang pernah menjadi wabah covid 19 yang bermula pada Desember 2019.⁵⁴

4. Penyebab Virus Corona

Infeksi virus Corona atau Covid 19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti *pneumonia*, *Middle-East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Ada dugaan bahwa virus Corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus Corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular Covid 19 melalui berbagai cara, yaitu:

- a) Tidak sengaja menghirup percikan ludah (*droplet*) yang keluar saat penderita Covid 19 batuk atau bersin
- b) Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita Covid 19
- c) Kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19

Virus Corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker. Karena mudah menular, virus Corona juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien Covid

⁵⁴Nahla shihab, *Covid-19 kupasan ringkas yang perlu anda ketahui*, (Tangerang selatan, Literati, 2020), h. 1-8, Diakses Tanggal 4 Juli 2020 Pukul 11.38. Lihat juga [https:// books.google.co.id](https://books.google.co.id)

19. Oleh karena itu, para tenaga medis dan orang-orang yang memiliki kontak dengan pasien Covid 19 perlu menggunakan alat pelindung diri (APD).⁵⁵

5. Pencegahan terhadap Covid 19

Covid 19 merupakan penyakit yang baru ditemukan oleh karena itu pengetahuan terkait pencegahannya masih terbatas. Kunci pencegahan meliputi pemutusan rantai penularan dengan isolasi, deteksi dini, dan melakukan proteksi dasar.

a) Vaksin

Salah satu upaya yang dikembangkan adalah pembuatan vaksin guna membuat imunitas dan mencegah transmisi. Saat ini, sedang berlangsung 2 uji klinis fase 1 vaksin Covid 19. Studi pertama dari *National Institute of Health (NIH)* menggunakan *Mrna-1273* dengan dosis 25, 100, dan 250. Studi kedua berasal dari China menggunakan *adenovirus type 5 vector* dengan dosis ringan, sedang dan tinggi.

b) Deteksi Dini dan Isolasi

Seluruh individu yang memenuhi kriteria suspek atau pernah berkontak dengan pasien yang positif Covid 19 harus segera berobat kefasilitas kesehatan. WHO juga sudah membuat instrumen penilaian berisiko bagi petugas kesehatan yang menangani pasien Covid 19 sebagai panduan rekomendasi tindakan lanjutan. Bagi kelompok risiko tinggi, direkomendasikan pemberhentian seluruh aktivitas yang berhubungan dengan pasien selama 14 hari, pemeriksaan ineksi SARS-CoV-2 dan isolasi.

Pada kelompok risiko rendah, diimbau melaksanakan pemantauan mandiri setiap harinya terhadap suhu dan gejala pernafasan selama 14 hari dan mencari bantuan jika keluhan memberat. Pada tingkat masyarakat, usaha mitigasi meliputi pembatasan bepergian dan kumpul massa pada acara besar (*Social Distancing*).⁵⁶

c) Higiene, Cuci Tangan, dan Disinfeksi

Rekomendasi WHO dalam menghadapi wabah Covid 19 adalah melakukan proteksi dasar yang terdiri dari cuci tangan secara rutin dengan alkohol atau sabun dan air, menjaga jarak dengan seseorang yang memiliki gejala

⁵⁵<https://www.alodokter.com/virus-corona>, Diakses Tanggal 4 Juli 2020 Pukul 11.54 Wib

⁵⁶World Health Organization, *Critical Preparedness, Readiness And Response Actions For Covid 19*, Geneva: World Health Organization, 2020

batuk atau bersin, melakukan etika batuk atau bersin, dan berobat ketika memiliki keluhan yang sesuai katagori suspek.

Rekomendasi jarak yang harus dijaga adalah satu meter. Pasien rawat inap dengan kecurigaan Covid 19 juga harus diberi jarak minimal satu meter dari pasien lainnya, diberikan masker bedah, diajarkan etika batuk / bersin dan diajarkan cuci tangan.⁵⁷

Perilaku cuci tangan harus diterapkan oleh seluruh petugas kesehatan pada lima waktu, yaitu sebelum menyentuh pasien, sebelum melakukan prosedur, setelah terpajan cairan tubuh, setelah menyentuh pasien dan setelah menyentuh lingkungan pasien. Air sering disebut sebagai pelarut univesal, namun mencuci tangan dengan air saja tidak cukup untuk menghilangkan corona virus karena virus tersebut merupakan virus RNA dengan selubung *lipid bilayer*.

Sabun mampu mengangkat dan mengurai senyawa hidrofobik seperti lemak atau minyak. Selain menggunakan air dan sabun, etanol 62-71% dapat mengurangi infektivitas virus. Oleh karena itu, membersihkan tangan dapat dilakukan dengan *hand rub* berbasis alkohol atau sabun dan air. Berbasis alkohol lebih dipilih ketika secara kasat mata tangan tidak kotor sedangkan sabun dipilih ketika tangan tampak kotor.⁵⁸

Hindari menyentuh wajah terutama bagian wajah, hidung atau mulut dengan permukaan tangan. Ketika tangan terkontaminasi dengan virus, menyentuh wajah dapat menjadi portal masuk. Terakhir, pastikan menggunakan tisu satukali pakai ketika bersin atau batuk untuk menghindari penyebaran droplet.

d) Alat Pelindung Diri

SAR-CoV-2 menular terutama melalui droplet. Alat pelindung diri (APD) merupakan salah satu metode efektif pencegahan penularan selama penggunaanya rasional. Komponen APD terdiri atas sarung tangan, masker wajah, kacamata pelindung, atau *face shield*, dan gaun nosteril

⁵⁷World Health Organization, *Clinical Management Of Severe Acute Respiratory Infection When Novel Coronavirus (N-Cov) Infection Is Suspected*. Geneva World Health Organization ,2020

⁵⁸World Health Organization, *Infection Prevention And Control During Health Care When Novel Coronavirus (N-Cov) Infection Is Suspected*. Geneva : World Health Organization 2020

lengan panjang. Alat pelindung diri akan efektif jika didukung dengan kontrol lingkungan dan teknik.

Penggunaan APD secara rasional dinilai berdasarkan resiko paparan dan dinamika transmisi dari patogen. Pada kondisi berinteraksi dengan pasien tanpa gejala pernapasan, tidak diperlukan APD. Jika pasien memiliki gejala pernapasan, jaga jarak minimal satu meter dan pasien dipakaikan masker. Tenaga medis disarankan menggunakan APD lengkap. Alat seperti *stetoskop*, *thermometer*, dan *spigmanometer* sebaiknya disediakan khusus untuk satu pasien. Bila akan digunakan untuk pasien lain, bersihkan dan *desinfeksi dsengan alcohol 70%*. *World Health Organization* tidak merekomendasikan penggunaan APD pada masyarakat umum yang tidak ada gejala demam, batuk, atau sesak.⁵⁹

e) Penggunaan Masker

Penggunaan masker bertujuan untuk memblokir pembawa yang menularkan virus. Cara yang umum untuk penularan virus pernapasan meliputi kontak dekat dalam jarak pendek dan transmisi *aerosol* jarak jauh. *Aerosol* tersebut berupa bersin dari pasien. Dengan menggunakan masker yang benar dapat secara efektif memblokir bersin dan karenanya mencegah virus masuk langsung kedalam tubuh. Tipe-tipe masker adalah sebagai berikut:

Masker N95 (Tanpa katup pernapasan), masker ini dikenal juga dengan nama *Respirator* N95. Alat ini merupakan alat pelindung pernapasan yang secara efektif dapat menyaring partikel diudara dan cocok untuk melindungi terhadap penyakit infeksi pernapasan yang menular melalui udara. Efisiensi filtrasi 95 % mencegah masuknya partikel yang sangat kecil (partikel dengan ukuran sekitar 0,3 μm). Frekuensi penggunaan dapat digunakan beberapa kali. Buang masker saat rusak, cacat, basah, atau kotor.

Masker N95 (Dengan katub pernapasan), masker ini sama seperti masker N59 tanpa katup pernapasan. *Respirator* N95 dengan katup pernapasan memiliki desain yang halus dengan beberapa penutup. Ini memungkinkan udara yang dihembuskan untuk keluar tanpa membiarkan partikel kecil masuk. Desain ini membusat

⁵⁹World Health Organization, *Advice On The Use Of Masks In The Community, During Home Care, And In Health Care Settings In The Context Of Covid 19 Geneva*, World Health Organization 2020

menghembuskan nafas lebih mudah dan membantu mengurangi akumulasi kelembaban dan panas. Efisiensi filtrasinya sama seperti masker N95 tanpa katup pernapasan, jenis ini 95% mencegah masuknya partikel yang sangat kecil (partikel dengan ukuran sekitar 0,3 μm). Adapun frekuensi penggunaannya sama seperti masker N95 tanpa katup pernapasan.⁶⁰

Masker bedah, masker ini digunakan sebagai alat pelindung dasar untuk perawat medis profesional atau personel medis terkait. Alat ini melindungi pemakai dari percikan dan tetesan yang mungkin mengandung kuman. Efisiensi filtrasi penyaringan setiap masker bedah tidak seragam. Beberapa jenis mungkin berkinerja lebih buruk dari standar kebutuhan masker bedah atau masker pelindung medis. Secara umum, alat ini bisa menyaring partikel yang kira-kira berukuran 5 μm . Ada lapisan luar penolak air yang menghalangi tetesan memasuki masker lapisan ditengah adalah lapisan penyaring. Frekuensi penggunaannya hanya sekali pakai.

Masker medis umum, masker ini merupakan masker perlindungan untuk sekali pakai untuk prosedur medis. Umumnya digunakan dalam lingkungan normal untuk mencegah masuknya partikel (seperti serbuk sari). Tidak disarankan untuk menyaring. Efisiensi filtrasinya tidak memenuhi persyaratan efisiensi penyaringan untuk partikel mikro dan bakteri karena memiliki kualifikasi yang lebih rendah dari masker bedah dan masker pelindung medis. Frekuensi penggunaan hanya sekali pakai.

Cotton face masks, masker ini digunakan untuk menjaga kehangatan dan mencegah masuknya partikel yang lebih besar seperti debu. Efisiensi filtrasinya hanya bisa menyaring partikel yang lebih besar, seperti jelaga atau debu. Frekuensi penggunaannya bisa dicuci dan digunakan kembali.⁶¹ Penggunaan masker yang benar Masker sekali pakai yang biasa digunakan disebut masker bedah. Hal yang diperlukan adalah penggunaan masker yang salah dapat meningkatkan resiko terjadinya infeksi.

⁶⁰<https://www.alodokter.com/berbagai-alasan-memakai-masker-mulut-untuk-kesehatan>, Diakses 16 Oktober 2020, 13.00 Wib

⁶¹<https://youvit.co.id/article/kenali-jenis-masker-yang-bagus-dan-aman>, Diakses 16 Oktober 2020, Jam 14.00 Wib

- 1) Sebelum menggunakan masker sebaiknya cuci tangan.
- 2) Tekuk bagian keras masker, agar menempel erat dihidung karena virus bisa masuk kedalam masker lewat sela-sela hidung
- 3) Buka lipatan masker dengan meregangkan kebawah, dan tutup hidung, mulut, sampai secara tepat
- 4) Dilarang keras menggunakan hanya didagu. Dengan menggunakan masker didagu, virus yang menempel didagu, virus yang menempel dimuka akan masuk kedalam masker, dan virus itu akan masuk kedalam hidung
- 5) Tolong tangan jangan sampai menyentuh permukaan masker, ketika anda sedang menggunakan masker. Saat anda tidak sengaja menyentuh permukaan masker, tolong cuci tangan. Hal yang perlu diketahui, tangan anda dan permukaan masker adalah tempat yang paling kotor.
- 6) Pada dasarnya masker sekali pakai langsung dibuang, tolong jangan gunakan lagi masker yang sudah dipakai. Cara melepas masker yang benar adalah tanpa menyentuh permukaan masker, lepas masker hanya dengan memegang tali masker, dan buang langsung ketempat sampah yang ada tutupnya. Setelah itu buang masker, cucilah tangan dengan bersih.⁶²

D. Corona Virus (Covid 19) Dalam Hukum Islam

Wabah penyakit yang melanda umat manusia sekarang pernah juga terjadi di zaman Rasulullah masih hidup. Wabah penyakit yang terjadi pada zaman Rasulullah adalah sejenis penyakit kusta, penyakit kusta ini juga termasuk penyakit keras, menular dan hingga menyebabkan kematian selain itu penyakit kusta ini dalam menjangkit manusia sangat cepat proses penyebarannya dimasa kala itu.

Zaman Rasulullah selain penyakit kusta, ada juga wabah penyakit lain yaitu dimana masa Rasulullah melakukan hijrah ke

⁶² Adityo Susilo, C. Martin Rumende, *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol.7 No.1(Juli 2020)h. 60-61

Madinah, situasi di Madinah saat itu sangat mencemaskan dan mengkhawatirkan dengan kondisi air yang kotor, keruh dan penuh wabah penyakit. Selain di zaman Rasulullah wabah penyakit juga pernah melanda di masa para sahabat yaitu pada masa khalifah Umar bin Khatab, adapun wabah penyakit yang terjadi pada masa Umar bin Khatab adalah penyakit kolera, yang pada saat itu rombongan khalifah Umar bin Khatab dan rombongan tengah mengadakan perjalanan menuju negeri Syam. Dalam kondisi seperti ini Khalifah Umar bin Khatab meminta saran dan masukan dari kaum Muhajirin dan kaum Anshar saat itu, apakah perjalanan dilanjutkan atau perjalanan dihentikan dan kembali ke Madinah. Maka dalam keadaan genting tersebut, disampaikan oleh seseorang Quraisy “Menurut kami, engkau beserta orang-orang yang bersamamu sebaiknya kembali ke Madinah dan janganlah engkau bawa mereka ke tempat yang terjangkit penyakit itu”. Abu Ubaidah bin Jarrah karena pada saat itu ia masih menyangkan keputusan khalifah maka Abu Ubaidah bin Jarrah berkata “ Kenapa engkau melarikan diri dari ketentuan Allah?”, maka khalifah Umar bin Khatab menjawab, bahwa apa yang dilakukannya bukanlah melarikan diri dari ketentuan Allah, melainkan untuk menuju ketentuanNya yang lain. Khalifah Umar bin Khatab memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan ke negeri Syam, hal ini terjadi setelah khalifah mendapat informasi dari Abdurrahman bin Auf bahwa suatu ketika Rasulullah melarang seseorang untuk memasuki suatu wilayah yang terkena wabah penyakit.⁶³

Maka dengan demikian dapat dipahami bahwa wabah penyakit ini bukan saja terjadi pada zaman modern seperti saat ini, tetapi pernah juga terjadi dimasa yang Rasulullah. Wabah penyakit yang melanda ummat manusia sekarang dan masa lalu berbeda jenis wabah penyakitnya, namun proses penyebaran dan akibat dari wabah penyakit tersebut memiliki kesamaan misalnya, penyebarannya sangat cepat dan penderitanya bisa menyebabkan kematian. Wabah penyakit didalam al-quran telah dijelaskan oleh Allah SWT melalui firman-Nya Surah At-Tagabun ayat 11-13

⁶³ Mukharm, Havis Aravik, Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19, Jakarta : Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, FSH UIN Syarif Hidayatullah, Vol. 7 No. 3 (2020),

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٢﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٣﴾

Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya, jika kamu berpaling Sesungguhnya kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang. (Dia-lah) Allah tidak ada Tuhan selain Dia. dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakkal kepada Allah saja. (Surah At-Tagabun ayat 11-13)

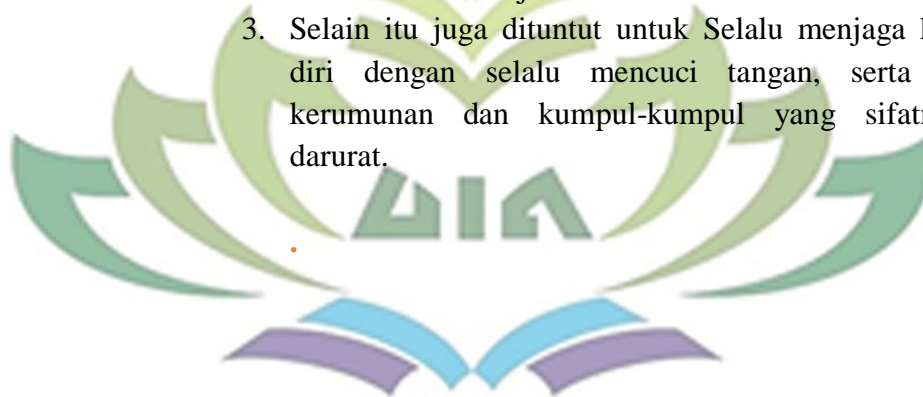
Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang pada dirinya, hartanya atau anaknya melainkan dengan kadda dan takdir Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, kadda-Nya dan takdirNya niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya dengan berserah diri kepada perintahnya, dan rida dengan takdir-Nya, dan Allah Mahatahu atas segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang luput dariNya. Seseorang tidaklah ditimpa sesuatu yang tidak diinginkannya kecuali dengan izin Allah, ketetapan, dan takdir-Nya. Barangsiapa beriman kepada Allah, niscaya Allah membimbing hatinya untuk menerima perintah-Nya dan rela kepada keputusan-Nya, Allah membimbingnya kepada keadaan, perkataan dan perbuatan terbaik, sebab dasar hidayah adalah hati, sementara anggota badan adalah pengikut. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, tidak ada sedikit pun yang samar bagi-Nya.⁶⁴

Merujuk pada ayat tersebut di atas yang dikaitkan dalam konteks sekarang, dengan adanya virus corona merupakan salah satu cobaan. Semua orang dibuat takut dan khawatir oleh

⁶⁴ Tafsir web melalui, <https://tafsirweb.com/10955-quran-surat-at-taghabun-ayat-11.html>, tanggal 30 Agustus 2020, pukul 15.00 WIB

penyebaran virus covid 19 ini. Oleh sebab itu, sikap yang diambil adalah meyakini bahwa virus adalah makhluk Allah, tunduk dan taat atas perintah Allah SWT. Dengan demikian, manusia diharuskan kembali kepada jati dirinya yaitu ada Yang Maha Kuasa dibalik semua kejadian di muka bumi ini. Sikap selanjutnya adalah berdoa karena kekhawatiran akan menyebarnya virus corona bukan menjadikan paranoid, sebagai insan beriman kita harus yakin bahwa semua itu atas kehendak-Nya, maka berdoa agar selamat dan dijaga dari penyebaran penyakit akibat virus corona menjadi sesuatu yang harus kita mohonkan kepada ⁶⁵Peran Nabi Muhammad Saw dalam mengatasi wabah *Tho'un*

1. Bentuk larangan nabi adalah agar dampak dan penyebaran wabah tidak meluas, sebagaimana sabda Rasulullah Saw “Dan janganlah mencampur yang sakit kepada yang sehat.
2. Diperbolehkannya seseorang keluar jika memiliki tujuan yang mendesak, seperti kehabisan pasokan makanan, atau berobat dan bekerja.
3. Selain itu juga dituntut untuk Selalu menjaga kebersihan diri dengan selalu mencuci tangan, serta menjauhi kerumunan dan kumpul-kumpul yang sifatnya tidak darurat.



⁶⁵ Sulaiman bin Al-Asy'ats, kitab sunan Abu Daud, juz 5, (Cet, 1 : Beirut: Dar ar-Risalah al-Alamiyah, 1430 H), h. 19.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Ali Zainal, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafika. Cetakan Ke 3. 2011.

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafika, Cetakan ke 3, 2011)

Al-Mawardi, *Al- Ahkam Al-Sultaniyyah Wu Ul- Wilayah Ad-Diniyyah*, AL-Makhtab Al-Islam, Bairut, 1416 II,

Amiruddin & Asikin Arifin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Amrusi Jailani Imam, *Hukum Tata Negara Islam.*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2014),

Arikonto Suhar, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta. 2006.

Bahansi Fathi Ahmad, *Al- Siyasah Al-Jinayah Fi Al-Syari'at Al-Islam* , (Mesir: Maktabah dar Al-Umdah, 1965)

Djazuli Ahmad, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Islam Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003)

Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Angkasa, 1995

Hasan Mustofa, *Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-kaidah Fikih*. (Ejournal . Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Ac.id),1999.

Iqbal Muhammad, *Fiqih siyasah kontekstualisasi doktrin politik islam*, Jakarta: Prenadamedia, 2014 . Diakses Tanggal 4 Juli 2020 Pukul 07.45 Wib. Lihat juga <https://books.google.co.id>

Jailani Amrusi Imam, *Et Al-Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2014)

Kartini Kartano, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Manadr Maju, 1996.

Khalaf Wahab Abdul, *Al-Siyasah Al-Syari'ah*, (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977)

Manzur Ibnu, *Lisan Al-Arab*, Juz 6 (Beirut: Dar Al- Shadar, 1968)

Mujur Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqih Siyasah Doktrin Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008

Mukhariman Randi, *Siyasah Kebangsaan.*, Purwokerto Jawa Tengah: Penulis Muda. 2010.

Nurhayati, *Fiqh dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018

Salim Petter, M.A., Yunny Salim, B. Sc. *Kamus Bahasa Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991

Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.

Syarifuddin Amir, *Pembaruan Pemikiran Dalam Islam, h. Ma'luf, al-munjid*

Sayuti Pulungan, *Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1997

Sazali Munawir, *Islam Dan Tata Negara*, Jakarta: UI Pres, 2010

Peraturan Bupati Tanggamus Nomer 55 tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid 19 Di Kabupaten Tanggamus

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indosia*. Jakarta: Balai Pustaka . 2007

Toto Tasmara, *Spiritual Centered Leadership* (Jakarta: Erlangga, 2005),

Undang-Undang Desa, Kelurahan Dan Kecamatan, Bandung: Focus Media, 2014

Undang-undang *Peraturan Daerah Dilengkapi Dengan Peraturan Pemerintah* Tangerang,Tansmart: Cetakan Pertama 2017

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 26 Ayat 1

JURNAL

Goot Louis Mustof Hasan, *Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-kaidah Fikih*,(Journal Institut Agama Islam Negeri Bengkulu)Schalk, Understanding Story, A. Primer Of Histirical, Terjemahan Nugraho Notosusanto, UI Press, 1995

Mukharm, Kebijakan Nabi Muhammad SAW Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19, Jakarta : Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, FSH UIN Syarif Hidayatullah, Vol. 7 No. 3 (2020),

Rumende Martin,*Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*,Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol.7 No.1 Juli 2020

Shihab Nahla, *Covid-19 kupasan ringkas yang perlu anda ketahui*, Tangerang selatan,Literati, 2020. Diakses Tanggal 4 Juli 2020 Pukul 11.38. Lihat juga [https:// books.google.co.id](https://books.google.co.id)

Susilo Adityo, C. Martin Rumende,*Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*,Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol.7 No.1 Juli 2020.

Tugas dan Fungsi Kepala Desa Beserta Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Kantor Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdangsri, Unila, Perspektif , Volume 7/ Nomor 2/ Oktober 2014,

Wawancara

Andi, Wawancara Dengan Selaku Kaur Pemerintahan, Tanggal 10 Agustus 2020

Bukhari, Wawancara Dengan Selaku Masyarakat Pekon Susuk, Tanggal 21 Agustus 2020

Helamin, Wawancara Dengan Kadus Pekon Susuk, Tanggal ttanggal 16 Agustus 2020

Hidayatulloh, Wawancara Dengan Selaku Seretaris , Tanggal 10 Agustus 2020

Hisam, Wawancara Dengan Selaku Masyarakat Pekon Susuk, Tanggal 12 Agustus 2020

Mahyuddin, Wawancara Dengan Selaku Kasi Kesra, Tanggal 10 Agustus 2020

Ruaida, Wawancara Dengan Selaku Masyarakat Pekon Susuk, Tanggal 31 Agustus 2020

Rustam, Wawancara Dengan Selaku Kaur Keuangan , Tanggal 22 Agustus 2020

Pahmi, Wawancara Dengan Selaku Tokoh Agama, Tanggal 20 Agustus 2020

Soejono, Wawancara Dengan Penanggungjawab Pekon Susuk Pada Tanggal 11 Agustus 2020

Skripsi

Sulaiman, Tinjauan Fikih Siyasah Al-Dusturiyah Terhadap Implementasi Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Dan Pembinaan Masyarakat Kecamatan Palengan Kabupaten Pmekasan, 2019)

Yulian Rizal, *Peran Perangkat Desa Untuk Mengembangkan Prinsip Transparansi Dalam Good Governance*, (Studi Kasus Di Desa Abela Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)

Lisa Oktavia, *Skripsi Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan*(Studi Di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kbupaten Pesisir Barat, 2018)

Sumber On-line

<https://brainly.co.id/tugas/390436>.Diakses.10 Mei,2020,Pukul 11.00 Wib

<https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus>.diakses.10 Mei.2020,Pukul 11.00 Wib

<https://www.alodokter.com/virus-corona>.diakses. 10 Mei 2020,Pukul 11.00 Wib

<https://www.kompasiana.com/>.diakses.10 Mei 2020,Pukul 11.00 Wib

[https:// www.alodokter.com/virus corona](https://www.alodokter.com/virus-corona), Diakses Tanggal 4 Juli 2020 Pukul 11.54 Wib

<https://Bangka-Tribunnews-Com>.Penjelasan-Who-tentang-pengertian-virus corona (Diakses Tanggal 5 Juli 2020)

Laz DD, Wabah Penyakit di Zaman Rasulullah, diakses melalui <https://zakat.or.id/wabah-penyakit-zaman-rasulullah/>, pada tanggal 30 Mei Pukul 22.00 WIB.